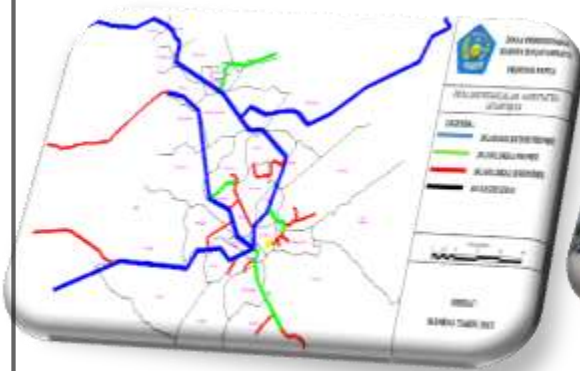


RENCANA STRATEGI OPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018 - 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PERHUBUNGAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan hidayahNya sehingga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ini telah disusun. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.


Dokumen ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan program prioritas RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Dalam dokumen ini digambarkan sasaran yang akan dicapai, keberhasilan dan kegagalan implementasi kegiatan serta evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dilakukan selama periode 5 (lima) tahun lalu dan untuk capaian periode 5 (lima) tahun mendatang.

Di dalam melaksanakan program / kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang, tentunya ditemui adanya tantangan yang dihadapi, namun demikian tantangan itu bukan merupakan suatu ancaman atau hambatan tetapi merupakan peluang untuk dapat mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya. Dengan disusunnya RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi pedoman pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Jayawijaya yang mendukung upaya peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan dukungan dalam penyelesaian Dokumen

RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya, sehingga dokumen ini dapat tersusun dengan baik.

Wamena, 02 September 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PARDOMUAN HARAHAHAP, S.IPem, M.Si
NIP. 19631028 198303 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	8
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	52
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	53
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.....	53
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya.....	54
3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi.....	55
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.....	58

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	62
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	62
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dengan Tujuan dan Sasaran PRJMD.....	63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	64
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	69
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	53
6.2 Indikator Kinerja Program Kelompok Sasaran dan Pendaan Indikatif.....	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
BAB VIII PENUTUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

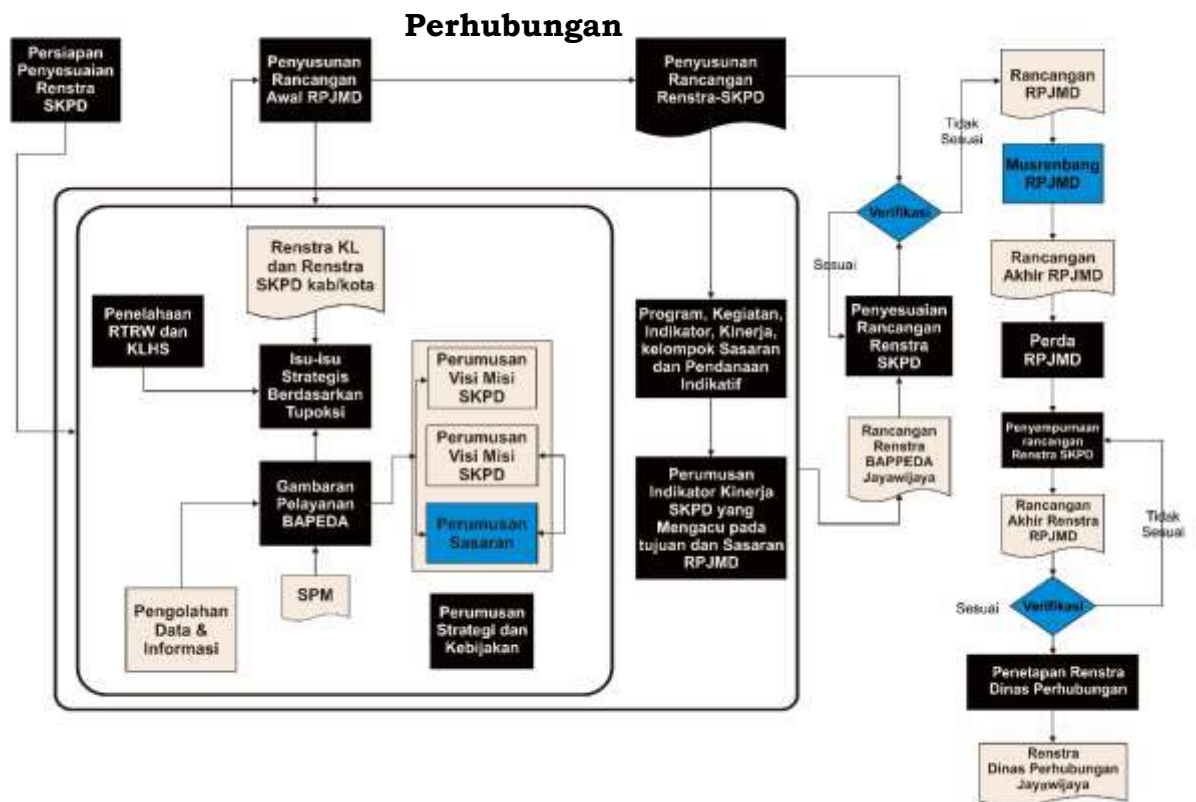
Penyusunan dan penetapan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 25 tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah**, sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 111 yang mencakup :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
3. Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah;
4. Tujuan dan sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Perhubungan berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jayawijaya untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya dan dilakukan review juga terhadap RENSTRA Kementerian Perhubungan dan RENSTRA Perhubungan Provinsi Papua. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Dinas



1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018–2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Cara Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan;
9. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

12. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan;
13. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008 – 2028;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi-organisasi daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2033;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005 – 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara keseluruhan tujuan penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya merupakan bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023. Penetapan Rencana Strategis dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam menentukan arah Kebijakan dalam melaksanakan dan mengembangkan program dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang.

Adapun tujuan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya adalah:

1. Menerjemahkan, menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil / kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
4. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang perhubungan yang efektif dan efisien, serta;
5. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran penetapan kinerja serta penilaian kinerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya disusun melalui sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas Perhubungan.

BAB III : Permasalahan dan Isu - isu Strategis Dinas Perhubungan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat identifikasi dan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya, telaahan rencana strategi kementerian / lembaga dan rencana strategi Provinsi / Kabupaten / Kota, serta penentuan isu-isu strategis Dinas Perhubungan.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya.

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta pendaan, mengemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,
:
mengemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya.

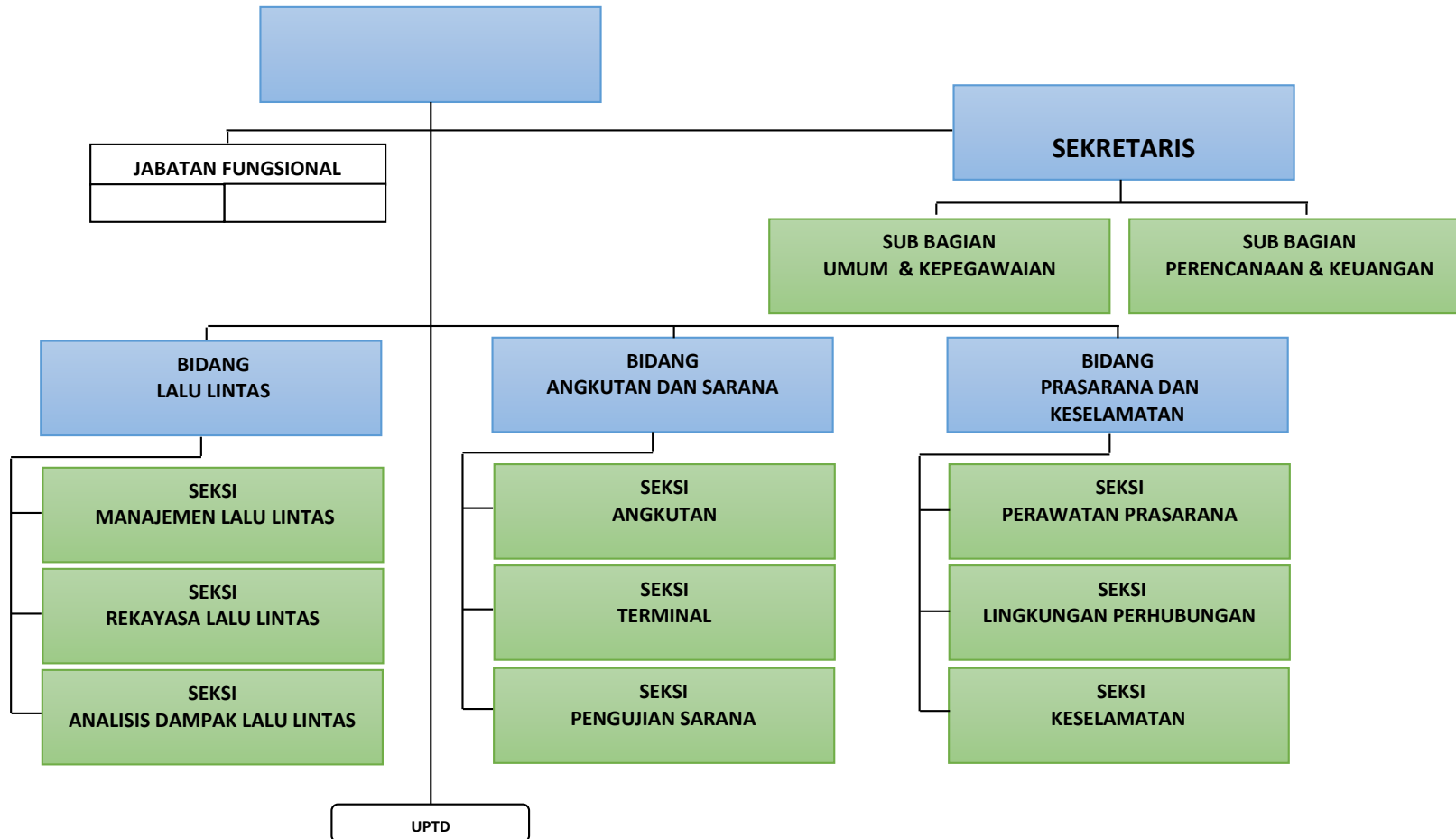
BAB VIII Penutup, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Struktur Organisasi



2.1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan merupakan unsur bidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan, melaksanakan urusan dibidang Perhubungan berdasarkan azas otonom dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya nomor : 55 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya dan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok dan fungsi Berdasarkan peraturan Bupati kabupaten Jayawijaya nomor : 55 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas perhubungan kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas pokok ***melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.***

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, **Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :**

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan dibidang perhubungan;
- 2) Penyelenggaraan urusan perhubungan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Dinas Perhubungan mempunyai wewenang sebagai berikut :

A. Uraian Tugas Dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas **Kepala Dinas Perhubungan** mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan diBidang Sarana Prasarana Perhubungan;
- b. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan diBidang Angkutan dan Sarana dan Perparkiran;
- c. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan diBidang Prasarana dan Keselamatan;
- d. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan diBidang Tata Usaha, Perlengkapan / Asset, Keuangan dan Kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengekoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di Dinas Perhubungan;
- b. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Perhubungan;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
- e. Pengekoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Perhubungan;

- g. Pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menghimbau, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan pengelolaan kepustakaan;
- c. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran, serta urusan rumah tangga;
- d. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, perumusan dan penghapusan barang;
- e. Mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- f. Menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitas bantuan hukum;
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan organisasi, tata laksana, keprotokolan dan hubungan masyarakat Dinas;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- j. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub bagian Perencanaan dan keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan bahan dan menyusun rencana, penganggaran Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya pokok sebagaimana dimaksud **subbag Perencanaan dan Keuangan** mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan yang dihimpun dari seluruh bidang/unit kerja dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi Renstra, Renja, RKA dan RKT;
- c. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- d. Menyusun laporan Dinas yang meliputi LAKIP, LPPD dan Laporan lainnya;
- e. Memantau dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama bidang perencanaan perhubungan dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten / kota serta lintas sektoral;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- h. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, verifikasi anggaran dan perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- i. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan bagi bendaharawan dinas;
- j. Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
- k. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan sesuai dengan standar / pedoman yang telah ditetapkan;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

- m. Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- n. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
- (3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas; dan
- (4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Lalu Lintas secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi :

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas

Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas. Dalam Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- (1) Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- (2) Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- (3) Menetapkan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten;
- (4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (5) Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- (6) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- (7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- (1) Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- (2) Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- (3) Menyediakan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
- (4) Melaksanakan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- (5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (6) Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- (7) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- (8) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Analisis Dampak Lalu Lintas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- (1) Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- (2) Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Analisi Dampak Lalu Lintas;
- (3) Memberikan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan Kabupaten;
- (4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (5) Membagi dan mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- (6) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- (7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Angkutan dan Sarana

Bidang Angkutan dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Angkutan dan Sarana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Angkutan dan Sarana menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan, terminal dan pengujian sarana;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan, terminal dan pengujian sarana;

- (3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan, terminal dan pengujian sarana;
- (4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Angkutan dan Sarana secara administratif dikoordinasikan oleh Sekertaris Dinas. Bidang Angkutan dan Sarana membawahi :

a. Seksi Angkutan

Seksi Angkutan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Angkutan dan Sarana dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Angkutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- (1) Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- (2) Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Angkutan;
- (3) Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- (4) Menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- (5) Menetapkan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- (6) Menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- (7) Menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah Kabupaten;

- (8) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (9) Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- (10) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- (11) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Seksi Terminal

Seksi Terminal mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Angkutan dan Sarana dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Terminal tipe C. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Terminal mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- (1) Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- (2) Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Terminal;
- (3) Mengelola terminal penumpang tipe C;
- (4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (5) Membagi dan mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- (6) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- (7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Seksi Pengujian Sarana

Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Angkutan dan Sarana dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian sarana. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pengujian Sarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- (1) Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- (2) Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Pengujian Sarana;
- (3) Pengujian berkala kendaraan bermotor;
- (4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (5) Membagi dan mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- (6) Meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- (7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Prasarana dan Keselamatan

Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Prasarana dan Keselamatan Transportasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Prasarana dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan transportasi;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan transportasi;
- (3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan keselamatan transportasi; dan

- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Bidang Prasarana dan Keselamatan membawahi :

a. Seksi Perawatan Prasarana

Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Perawatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Perawatan Prasarana, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- (1) Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- (2) Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Perawatan Prasarana;
- (3) Melakukan Perawatan Prasarana perlengkapan jalan;
- (4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (5) Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- (6) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- (7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Seksi Lingkungan Perhubungan

Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Lingkungan Perhubungan. Dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- (1) Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- (2) Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan;
- (3) Melakukan pemanduan moda;
- (4) Mengembangkan teknologi perhubungan;
- (5) Mengembangkan Lingkungan Perhubungan;
- (6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (7) Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- (8) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- (9) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Keselamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Keselamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- (1) Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- (2) Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Keselamatan;
- (3) Melakukan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten;

- (4) Melakukan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- (5) Fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten;
- (6) Fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- (7) Melaksanakan keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan;
- (8) Melaksanakan penegakan hukum oleh PPNS dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- (9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (10) Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- (11) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- (12) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- 1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dilapangan, maka dilingkungan Dinas Perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atau usul Kepala Dinas;
- 2) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri bersama dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Perhubungan.

C. Kelompok Jabatan Fungsional

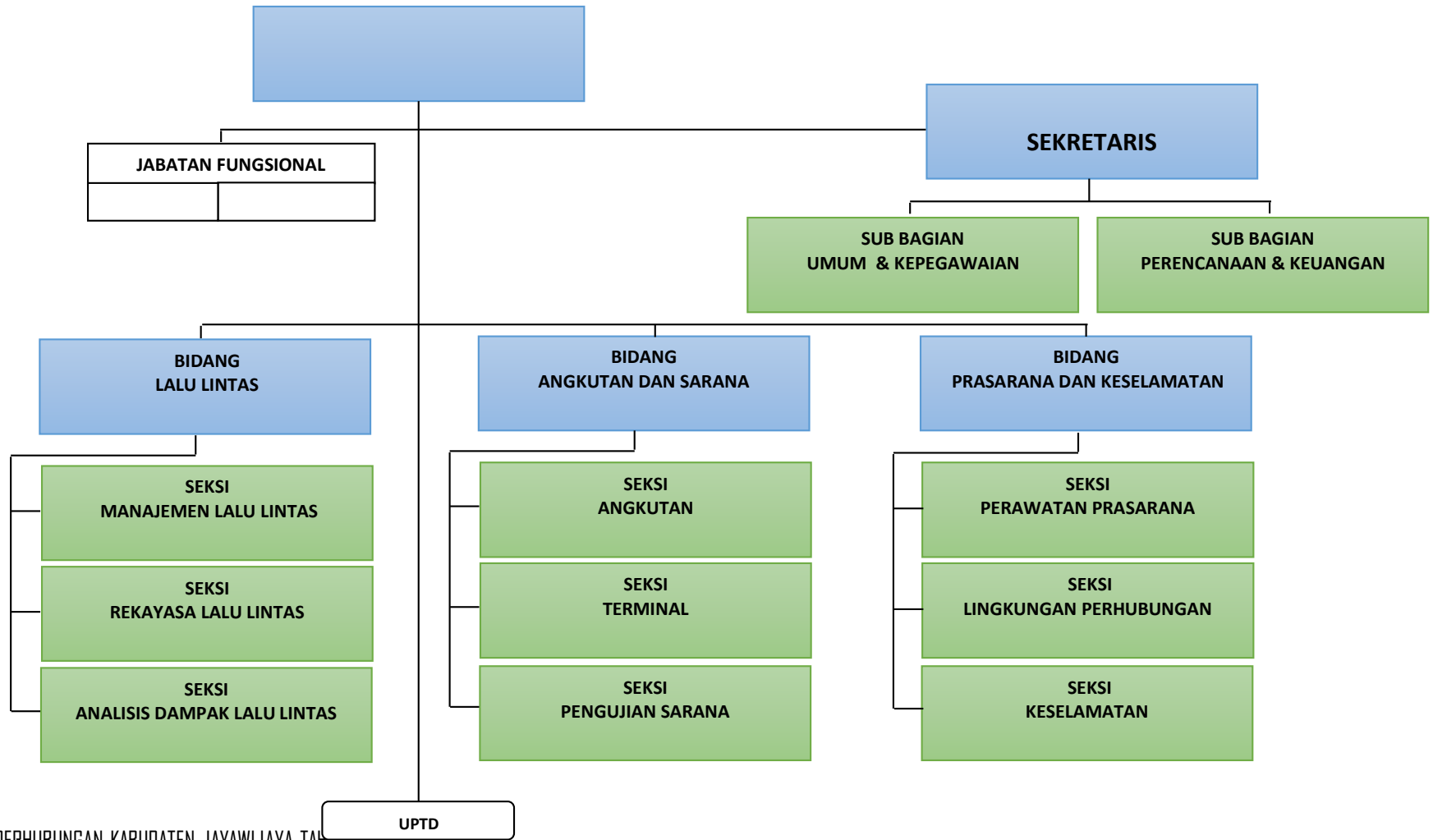
- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 2) Kelompok jabatan fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas;
- 3) Jumlah tenaga fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 5) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut :
 - a. Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan
 - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan / bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta ataupun tidak sesuai lingkup tugas dan keahliannya.
 - d. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. Menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut.
 - f. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
JAYAWIJAYA

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 17 - 11 - 2016



2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi / organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan didukung dengan beberapa aparatur yang terdiri dari PNS, dan Tenaga Kontrak / honor. Berdasarkan jumlah, golongan atau ruang dan latar belakang pendidikan formal maupun structural, aparatur diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya
berdasarkan Pangkat/Golongan dan jenis kelamin :

No	Pangkat/ Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	I	2	-	2
2	II	8	-	8
3	III	12	-	12
4	IV	3	-	3
5	Honorer	29	4	33
Jumlah Total		54	4	58

Sumber. Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab.Jayawijaya (Januari 2021)



Tabel 2.2
Non PNS / Tenaga Kontrak

No	Tingkat Pendidikan Formal	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	2	-	2
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	28	1	22
4	D1	-	-	-
5	D2	-	-	-
6	D3	1	-	1
7	S1	18	3	25
8	S2	1	-	1
9	S3	-	-	-
Jumlah (Orang)		50	4	54

Sumber. Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab.Jayawijaya (Juni 2021)

TABEL 2.2
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

Golongan/ Ruang	Kepala Dinas		Sekretariat		Bidang Sarana & Prasarana		Bidang MRL & Perparkiran		Bidang Angkutan & Terminal		Jumlah		Total
			L	P									
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
I	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2
II	-	-	1	-	3	-	2	-	2	-	8	-	8
III	-	-	5	-	2	-	2	-	3	-	12	-	12
IV	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	3
Honorar			2	1	8		8	3	7		25	4	29
TOTAL	1		9		14		17		13		54		54

Sumber. Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab.Jayawijaya (November 2021)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Perhubungan masih sangat kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya, ditunjang oleh sarana dan prasarana atau aset yang dimiliki, berikut ditampilkan dalam beberapa tabel sarana dan prasarana/aset yang dimiliki, antara lain:

Tabel 2.3
Prasarana dan Sarana Pelayanan

NO	Uraian	Satuan	Sekretariat				Bidang Lalu Lintas				Bidang Angkutan dan Sarana				Bidang prasarana dan Keselamatan				Kondisi Barang
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
A	KENDARAAN BERMOTOR																		
1	Kendaraan Roda 4 / Mobil	Unit	56	56	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Terbakar
2	Kendaraan Roda 2 / Motor	Unit	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hilang
B	PERABOT KANTOR																		
1	Filling Cabinet		2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hilang
2	Almari		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Almari arsip / Kepala Dinas		1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
	- Almari Kayu		3	3	3	3	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Bagus
	- Almari Besi		3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bagus
3	Meja Kerja																		
	- Meja Kerja Biro	Buah	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
	- Meja Kerja Setengah Biro	Buah	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Bagus
	- Meja Staf		26	26	26	26	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Bagus
4	Kursi																		

NO	Uraian	Satuan	Sekretariat				Bidang Lalu Lintas				Bidang Angkutan dan Sarana				Bidang prasarana dan Keselamatan				Kondisi Barang
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
	- Kursi Kayu Spon		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kursi Putar / Eselon	Buah	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bagus
	- Kursi Staf		26	26	26	26	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Bagus
	- Sofa	Pasang	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
	- Kursi Tunggu		1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
	- Kursi Lipat		4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
	- Kursi Panjang / Kayu	Buah	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
5	Rak Arsip		-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
6	Brankas	Buah	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
7	White Board	Buah	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
8	Papan Nama Instansi / Unit	Buah	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
9	Stempel Dinas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Tabung APAR	Buah	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
C	MESIN KANTOR																		
1	Mesin Ketik Manual		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Mesin Babat	Buah	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus

NO	Uraian	Satuan	Sekretariat				Bidang Lalu Lintas				Bidang Angkutan dan Sarana				Bidang prasarana dan Keselamatan				Kondisi Barang
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
D	PERALATAN ELEKTRONIK																		
1	Kipas Angin		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	AC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Televisi	Buah	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus	
4	Digital Camera		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	GPS Camera		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Handycam		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	PERALATAN KOMUNIKASI																		
1	Telepon	Buah	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus	
2	Fax	Buah	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus	
3	Repeater	Buah	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus	
4	Handy Talke		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tower triangle		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	PERALATAN KOMPUTER																		
1	PC Dekstop	Buah	8	8	8	8	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	Bagus
2	PC Note Book		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Printer	Buah	8	8	8	8	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	Bagus
4	Scanner	Buah	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
5	LCD Proyektor	Buah	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus

NO	Uraian	Satuan	Sekretariat				Bidang Lalu Lintas				Bidang Angkutan dan Sarana				Bidang prasarana dan Keselamatan				Kondisi Barang
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
6	Server	Set	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
7	Wi-fi Router		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Uninterruptibel Power Supply (UPS)		2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
9	Komputer Mainframe	Set	1																Bagus
G	PERALATAN LAPANGAN																		
1	Genset		1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
2	Kompresor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Mesin Bor		1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
4	Mesin Las		1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
5	Cetak Umpak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Crane		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Toolkit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Chainsaw		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Rambu Lalu Lintas Portable	Buah	-	-	-	-	10	23	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagus
H	PERALATAN UJI																		
1	Timbangan Portable		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Luxmeter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	Uraian	Satuan	Sekretariat				Bidang Lalu Lintas				Bidang Angkutan dan Sarana				Bidang prasarana dan Keselamatan				Kondisi Barang
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
3	Speedometer tester		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Diesel Smoke Tester		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	CO-HC tester		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Boogie Roller		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Brake+Axle Loud Tester		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Highlight tester		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pit Wheel Tester		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Side Slip Tester		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Sound Level Tester		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Jayawijaya beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

Tabel 2.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5
1	Persentase Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				57	100	100	-	-	40	40	40	-	-	70%	40%	40%	-	-
2	Jumlah Pelayanan Angkutan Yang Terlayani				23	0	12	-	-	21	0	10	-	-	91.30%	0%	83.33%	-	-
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terbangun				2	13	15	-	-	1	10	10	-	-	50%	77%	67%	-	-
4	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa				1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100%	100%	100 %	-	-
5	Persentase Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				1235	1309	1630	-	-	917	1046	1450	-	-	74.25%	79.90%	88.95%	-	-
6	Persentase Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan				1	1	1	-	-	0	0	1	-	-	0%	0%	100%	-	-
7	Jumlah Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan				0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	0%	0%	0%	-	-

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan

Tabel 2.5

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertambahan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
A. Program administrasi Perkantoran																	
1.1 Penyediaan Jasa Tenaga Surat Menyurat	1.221.173.000	1.218.173.000				1.221.166.400	1.136.000.000				99,99%	93,25%				3.000.000	(85.166.400)
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	15.000.000				37.326.000	15.000.000				93,31%	100%				(25.000.000)	(22.326.000)
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	31.500.000	15.500.000				18.892.000	14.893.000				59,97%	96,08%				(16.000.000)	(3.999.000)
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	45.130.800	45.130.800				45.130.800	45.130.800				100%	100%				0	0

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	108.543.000	100.000.000			108.543.000	100.000.000			100%	100%			(8.543.000)	(8.543.000)
1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.750.000	24.200.000			36.950.000	24.200.000			95,35%	100%			(14.550.000)	(12.750.000)
1.7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000			100%	100%			0	0
1.8 Penyediaan Makanan dan Minuman	100.000.000	20.000.000			99.460.000	20.000.000			99,46%	100%			(80.000.000)	(79.460.000)
1.9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	230.000.000	29.406.974			229.087.944	6.693.750			99,60	22,76			(200.593.026)	(222.394.194)
2.0 Sosialisasi/ Penyuluhan/ survey/ Monitoring Dalam Daerah	40.000.000	0			39.275.000	0			98,17	0%			(40.000.000)	(39.275.000)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
1.1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan	148.700.000	40.000.000			129.060.000	39.996.100			86,79%	99,99%			(108.700.000)	(89.063.900)

Dinas/ Operasional																
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan																
1.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisais Kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000			19.250.000	19.777.500			96,25%	98,88%			0	527.500		
Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan																
1.1 Peningkatan Sarana Lapangan Terbang	1.500.000.000	3.000.000.000			0	2.993.726.000			0%	99,79			1.500.000	2.993.726.000		
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarna Fasilitas LLAJ																
1.1 Rehabilitasi Pemeliharaan	50.000.000	250.000.000			50.000.000	248.270.000			100%	99,30			200.000.000	198.270.000		

Sarana dan Prasarana Lintas																	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan																	
1.1 Pengembangan sarana Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	780.000.000	800.000.000			762.000.000	800.000.000			97,69	100%				20.000.000	38.000.000		
1.2 Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	47.914.000	0			47.914.000	0			100%	0%				(47.914.000)	(47.914.000)		
Program pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan																	
1.1 Pembangunan dan pengadaan Sarana dan Prasarana	7.803.480.000	4.695.234.00			7.771.800.000	4.621.688.000			99,59%	98,43				(3.108.246.000)	(3.150.112.000)		

1.2 Pendamping Pembangunan dan Pengadaan sarana dan Prasarana	0	110.000.000			0	107.500.000			0%	97,72%			110.000.000	(107.500.000)
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas														
1.1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	100.000.000	0			99.982.000	0			99,98	0%			(100.000.000)	(99.982.000)
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor														
1.1 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	100.360.000	200.000.000			100.238.000	198.000.000			99,87%	99,00%			99.640.000	97.762.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota														
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan														

Evaluasi Kinerja Perangkat daerah																			
1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah			20.000.000					20.000.000			100%						0	0	
1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisais Kinerja SKPD			10.000.000					10.000.000			100%						0	0	
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.649.473.072					2.154.694.516			59,04%						0	0	
1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			30.000.000					30.000.000			100%						0	0	
1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			10.000.000					10.000.000			100%						0	0	

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
1.3.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			20.000.0000					19.954.500		99,77%						0		0	
1.4 Administrasi Umum Perangkat daerah																			
1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			20.000.000					19.700.000		98,5%						0		0	
1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			46.168.600					40.996.600		88,79%						0		0	
1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			21.300.0000					21.300.000		100%						0		0	
1.4.4 Penyediaan Bahan/ Material			29.997.000					29.993.250		99,98%						0		0	
1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			200.766.000					46.084.281		22,95%						0		0	

1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
1.5.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor			1.365.600.000						1.154.400.000		84,53%					0	0
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			52.800.000						7.784.000		14,74%					0	0
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			36.310.000						36.310.000		100%					0	0
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan																	

Angkutan jalan (LLAJ)																		
2.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota																		
2.1.1 Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten/ Kota			7.427.482.500				2.215.300.000		29,82%					0			0	
2.2 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
2.2.1 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			60.000.000				59.966.800		99,94%					0			0	
2.3 Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk jaringan Jalan Kabupaten/ Kota																		
2.3.1 Penataan Manajemen dan			496.500.000				0		0%									

Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota																	
Program pengelolaan Penerbangan																	
3.1 Penyediaan sarana dan Prasarana Serta pengelolaan Transportasi																	
3.1.1 Penyediaan sarana dan Prasarana Bandara/ Lapangan Udara			1.000.000.000				0		0%					0		0	

2.2.3.2 Pelayanan Surat Menyurat

Kegiatan surat menyurat Dinas Perhubungan terdiri dari pelayanan surat masuk, pelayanan surat keluar dan pelayanan registrasi surat keputusan kepala dinas.

Tabel 2.3.2.1 Pelayanan Surat Menyurat Tahun 2014 - 2021

Tahun	Surat Masuk	Surat Keluar	Surat Keputusan
2014	315	356	3
2016	415	402	2
2016	279	448	2
2017	218	267	2
2018	321	345	1
2019	330	350	1
2020	340	370	2
2021	355	390	2

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan

2.2.3.3 Pengelolaan Kepegawaian

Kegiatan pelayanan dan pengelolaan kepegawaian di Dinas Perhubungan meliputi surat perintah tugas, penerbitan cuti, pengusulan berkas kenaikan pangkat, pengusulan berkas kenaikan gaji berkala, pengusulan berkas pensiun, pelayanan pengajuan kartu suami / istri.

JENIS KEPEGAWAIN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penerbitan Surat Cuti	9	6	8	10	8	7	6	8
Usulan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala	10	12	10	11	18	18	18	18
Usulan Kenaikan Pangkat	3	5	1	-	6	6	8	7
Usulan Pensiun	1	-	1	5	2	1	-	-
Usulan PNS	-	-	-	4	-	-	-	-
Penerbitan Surat Perintah	13	18	27	14	34	20	15	14
Usulan Satya Lencana	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengajuan Karis / Karsu	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2.3.3 Pelayanan Kepegawaian Tahun 2014 - 2021

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan

2.2.3.4 Kegiatan Rapat

Kegiatan rapat di Dinas Perhubungan meliputi rapat Evaluasi Kinerja Dinas setiap bulan dan triwulan, serta rapat insidentil.

Tabel 2.2.3.4 Pelayanan Rapat Tahun 2018 – 2021

Tahun	Rapat Dinas	Pembinaan Kepala Dinas
2018	7	8
2019	6	10
2020	8	9
2021	6	5

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan

2.2.3.5 Pelayanan Rekomendasi Izin Trayek

Jumlah pelayanan rekomendasi izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 5 tahun relatif meningkat, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.3.5 Pelayanan Izin Trayek Tahun 2014 – 2021

TAHUN	Rekomendasi Izin Trayek	(SIAU)
2014	971	971
2015	1.183	1.183
2016	1.265	1.265
2017	1.437	1.437
2018	1.574	1.574
2019	2.243	2.243
2020	2.386	2.386
2021	2.459	2.459

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan

2.2.3.6 Terminal

Jumlah terminal yang dikelola Dinas Perhubungan tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.6 Pengelolaan Terminal Tahun 2016 – 2021

TAHUN	TERMINAL TIPE LAYANAN C	TERMINAL BAYANGAN
2016	1. Terminal Jibama	1. Terminal Sinakma 2. Terminal Woma 3. Terminal Potikelek 4. Terminal Depan Bank BRI
2017	1. Terminal Jibama	1. Terminal Sinakma 2. Terminal Woma 3. Terminal Potikelek 4. Terminal Depan Bank BRI
2018	1. Terminal Jibama	1. Terminal Sinakma 2. Terminal Woma 3. Terminal Sementara Dalam Kota (Depan Mall) 4. Terminal Potikelek 5. Terminal Depan Bank BRI

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan

2.2.3.7 Perusahaan Transportasi Angkutan Umum

Angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Jayawijaya terdiri dari angkutan pariwisata, angkutan pedesaan, angkutan kota, dan angkutan barang. Jumlah angkutan umum dalam kota cenderung mengalami peningkatan dalam 8 tahun terakhir, berikut data angkutan umum :

Tabel 2.2.3.7 Jumlah Angkutan Tahun 2014 – 2021

TAHUN	ANGKUTAN PARIWISATA	ANGKUTAN PEDESAAN	ANGKUTAN KOTA	ANGKUTAN BARANG
2014	-	329	642	66
2015	-	368	815	167
2016	-	404	861	365
2017	-	446	991	436
2018	-	467	1.107	479
2019	-	593	1.650	220
2020	-	402	1.984	210
2021	-	354	2.105	215

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan

2.2.4 Angkutan Umum

Jumlah angkutan kota dan angkutan pedesaan dalam kurun waktu 8 tahun relatif meningkat, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.8.1 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2014 – 2021

TAHUN	ANGKUTAN KOTA	ANGKUTAN PEDESAAN	JUMLAH
2014	329	642	971
2015	368	815	1.183
2016	404	861	1.265
2017	446	991	1.437
2018	467	1.107	1.574
2019	593	1.650	2.243
2020	402	1.984	2.386
2021	354	2.105	2.459

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan

2.2.5 Fasilitas Lalu Lintas Terpasang

Fasilitas sarana prasarana lalu lintas cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Berikut rincian data fasilitas lalu lintas yang terpasang:

Tabel 2.3.9.1 Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang Tahun 2014 – 2021

URAIAN	Satuan	TAHUN							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rambu	Unit	40	40	40	30	40	40	40	40
Marka Jalan	Km	3	6	6	2	2.5	2.5	-	-
Flashing Light	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagar Pengaman	meter	-	-	-	-	-	-	-	-
Cermin Cekung	buah	-	-	-	-	-	-	-	-
RPPJ	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
Traffic Cone	Unit	5	5	7	8	10	10	40	40
Barikade Lalu Lintas	Unit	-	-	10	10	10	10	-	-
Deliniator	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
Box Lampu 3 aspek 20 cm	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
Box Control	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
APPIL : Kabupaten	Titik	-	-	2	5	5	5	5	5

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan

2.2.6 Perparkiran

Penarikan retribusi parkir kendaraan tepi jalan umum terdapat pada tiga lokasi diantaranya Pasar Jibama, Pasar Potikelek, dan Bandar udara wamena. Berikut rincian jumlah retribusi parkir :

Tabel 2.3.10.1 Jumlah Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2014 – 2021

TAHUN	LOKASI PARKIR TEPI JALAN UMUM (titik)	PENDAPATAN RETRIBUSI (Rp)
2014	3	191.500.000, 00
2015	3	191.500.000, 00
2016	3	191.500.000, 00
2017	3	191.500.000, 00
2018	3	191.500.000, 00
2019	3	191.500.000, 00
2020	3	191.500.000, 00
2021	3	191.500.000, 00

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan

2.2.7 Pelayanan Kendaraan Bermotor

Jumlah pelayanan kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan dalam 8 tahun terakhir cenderung meningkat, berikut data kendaraan yang melakukan uji berkala :

Tabel 2.3.11.1 Jumlah Kendaraan Bermotor UPTB Wamena Tahun 2014 – 2021

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mini Bus	Umum	960	961	967	974	980	980	980	980
	Non- Umum	449	470	493	567	520	520	520	520
	Jumlah	1409	1431	1460	1541	1500	1500	1500	1500
Micro Bus	Umum	33	33	33	34	34	34	34	34
	Non- Umum	3	3	3	3	3	3	3	3
	Jumlah	36	36	36	37	37	37	37	37
Pick Up	Umum	1108	1173	1236	1297	1354	1354	1354	1354
	Non- Umum	292	310	317	335	350	350	350	350
	Jumlah	1400	1483	1553	1632	1704	1704	1704	1704
Truck	Umum	20	20	20	20	20	20	20	20
	Non- Umum	4	4	4	4	4	4	4	4
	Jumlah	24	24	24	24	24	24	24	24
Tangki	Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
	Non- Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-
Kend. Khusus	Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
	Non- Umum	3	3	3	3	3	3	3	3
	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL	Umum	2121	2167	2283	2325	2388	2388	2388	2388
	Non- Umum	751	826	820	912	880	880	880	880
	Jumlah	2872	2993	3103	3237	3268	3268	3268	3268

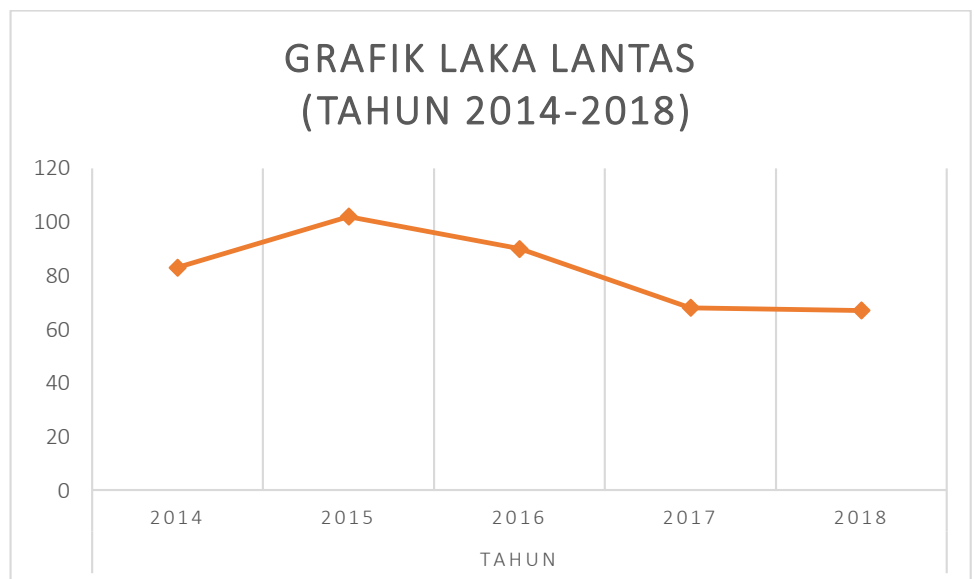
Sumber : Analisis Dinas Perhubungan

2.2.8 Kecelakaan Lalu Lintas

Angka kecelakaan lalu lintas dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Jayawijaya, cenderung variatif. Berikut data kecelakaan lalu lintas dalam periode Lima (5) tahun terakhir :

No	Tahun	Uraian	Jumlah	Kerugian Materi (Rp)
1	2014	MD	15	756,500,000
		LB	38	
		LR	30	
		Jumlah	83	
2	2015	MD	15	992,700,000
		LB	40	
		LR	47	
		Jumlah	102	
3	2016	MD	23	546,000,020
		LB	25	
		LR	42	
		Jumlah	90	
4	2017	MD	12	443,000,000
		LB	24	
		LR	32	
		Jumlah	68	
5	2018	MD	16	622,000,000
		LB	19	
		LR	32	
		Jumlah	67	
TOTAL			410	3,360,200,020

Sumber : POLRES Jayawijaya



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan antara lain sebagai berikut :

TANTANGAN:

1. Belum tersedianya fasilitas terminal angkutan umum dalam kota, sehingga penyelenggaraan pelayanan angkutan umum tidak berjalan secara optimal;
2. Kondisi Infrastruktur jalan dalam kota kurang memadai;
3. Banyaknya kendaraan dari luar yang beroperasi di Kabupaten Jayawijaya;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas dan keselamatan berlalu lintas.

PELUANG:

1. Tingginya kesadaran pemilik kendaraan angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor;
2. Terbukanya infrastruktur jalan antar kabupaten & provinsi, sehingga memungkinkan terjangkaunya daerah pelayanan angkutan umum;
3. Tingginya jumlah pengguna jasa angkutan umum.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Identifikasi permasalahan diperlukan untuk menentukan program yang tepat guna mengatasi hasil kompilasi masalah yang ditemukan. Identifikasi permasalahan didapat dari berbagai sumber dan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain hasil evaluasi RPJMD dan RKPD, LPPD dan LKPJ serta telaahan dari narasumber.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya dikelompokkan menurut pelayanan yang diselenggarakan pada masing-masing Bidang dijelaskan dalam table berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar serta utilitas pendukung pariwisata	1. Terbatasnya jaringan infrastruktur perhubungan; 2. Meningkatnya Akses Transportasi Desa	1. Belum tertatanya sarana transportasi darat dalam kota; 2. Belum terjangkaunya sarana transportasi hingga ke kampung-kampung; 3. Tingginya biaya transportasi darat dan udara; 4. Tingginya Angka Kecelakaan Lalu Lintas; 5. Tidak Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

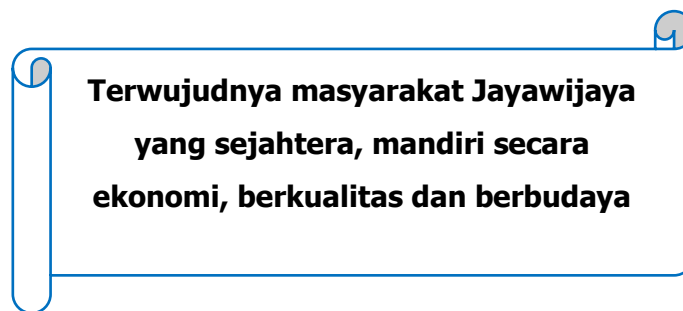
Sumber : RPJMD kabupaten Jayawijaya

Secara umum, penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Perhubungan berjalan sesuai tugas pokok fungsinya. Namun akar permasalahan yang perlu

diantisipasi yaitu rendahnya kerjasama antar daerah dalam peningkatan pelayanan perhubungan sehingga penyelenggaraan sistem transportasi darat belum optimal, serta biaya transportasi baik darat maupun udara yang relatif tinggi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya

Bupati Jayawijaya menentukan visi dan misi pembangunan Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 yang menjadi bagian dari tujuan terwujudnya masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang sejahtera, mandiri secara ekonomi, berkualitas dan berbudaya. Adapun visi misi pembangunan Tahun 2018-2023 adalah :



Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM Jayawijaya melalui bidang Pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong partisipasi, kemandirian dan produktifitas;
4. Mewujudkan potensi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar OAP;
5. Mengembangkan perekonomian Jayawijaya berbasis kota jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

<u>VISI</u>		
“Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang sejahtera, mandiri secara ekonomi, berkualitas dan berbudaya”		
Misi Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Mengembangkan perekonomian Jayawijaya berbasis kota jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kerjasama antar daerah dalam peningkatan pelayanan perhubungan darat; - Belum tertatanya sarana transportasi darat dalam kota; - Belum terjangkaunya sarana transportasi hingga ke kampung-kampung; - Tingginya biaya transportasi darat dan udara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan; - Penataan Terminal yang sesuai dengan standar yang berlaku; - Peningkatan pelayanan melalui UPT Transportasi; - Pemerataan pelayanan transportasi hingga pada wilayah sentra produksi ekonomi.

Sumber : RPJMD kabupaten Jayawijaya

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

➤ Renstra Kementerian Perhubungan

Sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor transportasi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Renstra Kementerian Perhubungan				
A.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi			
1	Menurunnya angka kecelakaan transportasi	Angka kasus kecelakaan transportasi darat di Jayawijaya kembali meningkat	- Tidak tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor - Faktor kelalaian dan kurang tertibnya pengguna jalan	Terwadahnya kegiatannya kampanye keselamatan dan ketertiban lalu lintas
2	Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi	Terdapat laporan kejadian gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi di kabupaten Jayawijaya	Sarana penunjang keselamatan sangat minim	Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan kepada awak angkutan umum
B.	Pelayanan Transportasi			
1	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan sarana transportasi	- Terminal tidak memadai - Pengaturan trayek pedesaan belum optimal	Tidak Tersedianya fasilitas utama dan penunjang terminal	Mendorong pemerintah daerah membangun terminal dalam kota

2	Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan	Minimnya jumlah tenaga teknis bidang perhubungan / transportasi	Keterbatasan SDM dalam bidang Perhubungan	Perekrutan tenaga teknis bidang perhubungan
3	Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	Belum tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ	Belum tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ	Terwadahnya kegiatan penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ di 2018
C	Kapasitas Transportasi			
1	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda	Belum optimalnya koordinasi dengan Dinas Perhubungan tingkat Provinsi	Rendahnya kerjasama antar daerah dalam peningkatan pelayanan perhubungan darat	Membangun koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi
2	Meningkatnya Produksi angkutan penumpang dan barang	Menurunnya penggunaan angkutan umum penumpang	Animo masyarakat pengguna transportasi umum menurun	Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum dan wilayah pelayanan
3	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana	Peta kawasan rawan bencana dengan akses transportasi belum tersedia	Belum tersedianya peta kawasan rawan bencana dengan akses transportasi	Terbangunnya aksesibilitas ke daerah-daerah rawan bencana

4	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Menurunnya jumlah trayek terlayani	Trayek angkutan perkotaan belum bisa dikembangkan hingga ke kampung-kampung	Tersedianya angkutan perkotaan
5	Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan	Kurangnya inovasi pembangunan sistem informasi dan manajemen transportasi	SDM yang belum memadai	Meningkatkan kapasitas SDM Bidang perhubungan

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

➤ Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jayawijaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya. Permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun ditampilkan pada table berikut :

Tabel 3.4.1 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan telaahan RTRW

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Sistem Jaringan Transportasi Darat			
a.	Peningkatan dan / atau pembangunan terminal Kabupaten	Belum tersedianya ruang parkir dan bongkar muat bagi barang truk muatan besar yang terpusat dan terkendali	Belum tersusunnya dokumen AMDAL / ANDALALIN	
2.	Sistem Jaringan Transportasi			
a.	Peningkatan Bandar Udara Wamena	Kewenangan Pemerintah Pusat	-	-

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan

➤ **Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa rencana program/kegiatan sudah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya terhadap hasil analisis KLHS ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.2 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan kaidah/konsep <i>green building</i>	Masih terdapat Central Bussiness District (CBD) terbangun yang belum menyusun analisa dampak lalu lintas	Tidak ada pengawasan dan pengendalian kebutuhan terhadap rekomendasi andalalin yang diterbitkan	UU 22/2009 Pasal 99 ayat (1)"setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas"

2	Desiminasi informasi mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan; mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum		- Belum terselenggaranya kegiatan uji emisi kendaraan - Terselenggaranya pelayanan uji kenadaraan bermotor - Penegakan hukum terkoordinasi antar lintas instansi	

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang dengan pertimbangan isu-isu strategis dan dinamika internasional, nasional, maupun regional. Rumusan isu strategis sebagai berikut :

1. World Health Organization (WHO) menempatkan kecelakaan lalu lintas sebagai urutan tertinggi penyebab kematian manusia (Global Status Report On Road Safety, WHO, 2015)
2. Persaingan pasar otomotif turut mendorong kemudahan kepemilikan kendaraan bermotor.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan tujuan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan sedangkan pelayanan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi daya guna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah dinas perhubungan Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini :

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Misi 1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik							
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	3,06	+30,56	35,80	65,025	67,78	70,01
			Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil BPK	0,25%	0,23%	0,22%	0,15%	0,10%	0,01%
2	Misi 5	Mengembangkan sektor jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutan dan memadai.							
2	Terwujudnya Manajemen Perhubungan Yang Berkualitas	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Transportasi	80%	80%	80%	85%	90%	93%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Publik Darat	Persentase Transportasi Publik Sesuai Dengan NSPK	75%	75%	75%	80%	85%	90%
			Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi	60%	60%	60%	65%	70%	75%
			Jumlah orang yang berpindah menggunakan Transportasi Publik	80%	80%	80%	85%	90%	92%
			Jumlah Barang yang dipindahkan/diangkut menggunakan Transportasi Publik	85%	85%	85%	88%	90%	93%

Sumber : DINAS PERHUBUNGAN

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN JAYAWIJAYA 2018-2023 DENGAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018-2023

RPJMD TAHUN 2018-2023	RENSTRA TAHUN 2018-2023
<p style="text-align: center;">VISI</p> <p>Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang sejahtera, mandiri secara ekonomi, berkualitas dan berbudaya</p>	<p style="text-align: center;">TUJUAN</p> <p>Terwujudnya Manajemen Perhubungan Yang Berkualitas Indikator : Indeks Akseibilitas</p>
<p style="text-align: center;">MISI KE-5</p> <p>Meningkatkan Infrastruktur Dasar Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata yang Berkelanjutan dan Memadai</p>	<p style="text-align: center;">SASARAN</p> <p><u>SASARAN A</u> Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat</p> <p><u>SASARAN B</u> Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Publik Darat</p> <p><u>SASARAN C</u> Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Dinas Perhubungan</p>
<p style="text-align: center;">MISI 5 TUJUAN 1 :</p> <p>Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar Wilayah dan Kawasan untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan</p>	
<p style="text-align: center;">SASARAN</p> <p>Terwujudnya Manajemen Perhubungan Yang Berkualitas</p>	<p style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA</p> <p>A. Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Transportasi</p> <p>B. - Persentase Transportasi Publik Sesuai Dengan NSPK -Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi -Jumlah orang yang berpindah menggunakan Transportasi Publik -Jumlah barang yang dipindahkan/ diangkut menggunakan Transportasi Publik -Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil Pemeriksa BPK pada Dinas Perhubungan</p> <p>C. Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan</p>
<p style="text-align: center;">INDIKATOR SASARAN</p> <p>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang berkualitas</p>	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

5.1.1 Bidang Perhubungan

Pembangunan Infrastruktur merupakan prioritas Nasional dari Presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan transportasi dalam kurun waktu 2015-2020 adalah mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Hal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa transportasi merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesibilitas ke seluruh wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara umum Rencana Strategis Kementerian perhubungan Tahun 2015-2020 memuat keseluruhan kebijakan publik dilingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sector perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan perhubungan , berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan mulai diberlakukan Pada Tahun 2018.

Untuk Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada tabel 5.2

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Pengantar

Rincian program dan kegiatan Dinas Perhubungan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2018-2023 beserta target capaian yang ditetapkan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan di bidang Perhubungan meliputi :
 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 5. Program Rehabilitasi dan Keselamatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Untuk rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan , proses, keluaran , hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan kabupaten Jayawijaya ini merupakan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang sejalan dengan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Dinas Perhubungan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi jangka menengah daerah maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021-2024 ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

BAB VIII

PENUTUP

Revisi renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD RPJMD dan RKPD.

Penyusunan revisi renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 dalam hal ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 yang baru saja dievaluasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya tahun 2021, Serta sebagai suatu wujud perencanaan tanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang harus dicapai melalui program prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah selama 5 (lima) Tahun kedepan. Dalam penyusunan RENSTRA PD ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten Jayawijaya.

Selanjutnya Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, tidak terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja. Dalam perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Dinas Perhubungan sebagai satu instansi yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam Pelayanannya.

Sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaay 2018-2023 akan dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaay selama periode tersebut mengikuti periode berikutnya RPJMD Kabupaten Jayawijaya.

Renstra Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang vital dan urgent dalam pengembangan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan selama lima

tahun ke depan, memberikan arah , tujuan , dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya.

ReRenstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya merupakan penjabaran dokumen RJMD, selanjutnya renstra akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya pada tahun-tahun berikutnya.

Naskah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya 2018-2023.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good govermane*). Pencapaian Kinerja Pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggung jawaban kepada Bupati serta secara moral dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 diharapkan dapat membuat pelayanan Dinas Perhubungan semakin lebih baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya disusun dalam rangka menjadi kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya (Renja) Tahun 2018 s/d 2023 dan menjadi acuan bagi Unit Kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya dalam menyusun Rencana kerja Tahunan 2018 s/d 2023.
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 s/d 2023 dengan mengacu pada Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 s/d 2023 khususnya sector transportasi.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya berkewajiban menjadi konsistensi antara Rencan Strategis (RENSTRA) dengan Rencana Kerja unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya
5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya 2018 s/d 2023, masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan kabupaten Jayawijaya berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan RENSTRA dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 s/d 2023.

8.2 Pedoman Transisi Dalam Rangka Mengisi Kekosongan Periode Dokumen Perencanaan

Sebagai acuan untuk kegiatan ini dan program untuk mengisi kekosongan periode dalam masa transisi maka Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya menyiapkan beberapa

Program dan kegiatan yang mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
5. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.



Tabel 5.2

Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya

	Misi 5	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
1	Mengembangkan sektor jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutan dan memadai.	1 Mewujudkan Manajemen Perhubungan Yang Berkualitas	1 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	1 Menurunkan Titik Rawan Kecelakaan Transportasi	1 Menyediakan prasarana dan fasilitas keselamatan jalan sesuai dengan kebutuhan	1 Program Penyelenggaraan lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Prasarana dan Keselamatan
			1 Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Publik Darat	1 Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan publik sesuai dengan NSPK	1 Penataan jaringan trayek dan pemerataan wilayah cakupan angkutan umum	1 Program Penyelenggaraan lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Angkutan dan Sarana

					2	Menciptakan system hirarki simpul-simpul pelayanan angkutan umum berupa Terminal, halte	2	Menyediakan Prasarana/ simpul-simpul transportasi jalan sesuai dengan kebutuhan	2	Program Penyelenggaraan lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Prasarana dan Keselamatan dan Bidang Angkutan dan Sarana
					3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pemahaman pengguna angkutan umum terhadap moda transportasi	3	Merencanakan, menyusun kebijakan, Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Prasarana dan fasilitas perhubungan	3	Program Penyelenggaraan lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Lalu Lintas dan Bidang Angkutan dan Sarana
					4	Meningkatkan disiplin masyarakat pengguna moda transportasi	4	Pengawasan dan sosialisasi di bidang Lalu Lintas	4	Program Penyelenggaraan lalu Lintas Dan	Bidang Lalu Lintas

									Angkutan Jalan (LLAJ)			
				1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perhubungan	1	Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	Bidang Sekretariat

					2	Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan	2	Penegakan tindak lanjut atas rekomendasi legal/ hukum hasil pengawasan/ audit yang dilakukan secara transparan dan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bidang Sekretariat
--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	--	--------------------

Sumber : RPJMD Kabupaten Jayawijaya

2.07.2.07.01.26			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen		65%		75%										Bidang Lalu Lintas dan Bidang Angkutan dan sarana
2.07.2.07.01.26.01				Peningkatan Pengelolaan Lapangan terbang		Jumlah Prasarana Fasilitas Lapter Yang Terbangun	M2		450	1.500.000.000	450	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.07.2.07.01.16			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAU			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkualitas	Persen		60%		60%										Bidang Prasarana dan Keselamatan dan Bidang Angkutan dan sarana
2.07.2.07.01.16.05				Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas		Jumlah Prasarana Fasilitas LLAU yang terpelihara	Buah	75.000.000	50	50.000.000	5	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.07.2.07.01.17			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persen		75%		75%										Bidang lalu Lintas
2.07.2.07.01.17.12				Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan		Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan yang diadakan	Unit	2.281.020.000	2	780.000.000	2	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.07.2.07.01.17.14				Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban lalu Lintas dan Angkutan.	Orang	50.000.000	50	47.914.000	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.07.2.07.01.18			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			Persentase Pelayanan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	Persen		80%		85%										Bidang Lalu Lintas dan Bidang Angkutan dan sarana
2.07.2.07.01.18.08				Pendamping Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana		Terlaksananya Perencanaan Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Paket				1	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.07.2.07.01.18.05				Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana		Tercapainya Mobilitas dan Aksesibilitas Masyarakat	KM	4.599.980.000	3	7.803.480.000	4	4.695.234.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.07.2.07.01.25			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			Terlaksananya Pelayanan Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas	Persen		80%		85%										Bidang lalu Lintas
2.07.2.07.01.25.02				Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas		Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas dan panjang Jalan Marka Jalan	Buah	100.000.000	40	100.000.000	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat			Terlaksananya Penurunan Titik rawan Kecelakaan Transportasi	Persen		80%		80%										
2.07.2.07.01.20			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			Tersedianya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persen		75%		80%										Bidang Prasarana dan Keselamatan
2.07.2.07.01.20.03				Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor		Jumlah kendaraan bermotor yang melaksanakan uji petik	Unit	600.000.000	900	100.360.000	2000	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Terwujudnya Manajemen Perhubungan Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perhubungan																			
02.15.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota			Persentase Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota															
2.15.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															Bidang Sekretariat
2.15.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen						1	20.000.000	2	5.000.000	20.000.000				

2.15.01.2.01.02					Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen					1	10.000.000				10.000.000						
2.15.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Keuangan Perangkat Daerah															Bidang Sekretariat		
2.15.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	ASN					30	3.649.473.072	30	3.649.473.072		3.649.473.072						
2.15.01.2.02.06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen					1	30.000.000	1	5.000.000		30.000.000						
2.15.01.2.02.07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran Pertama	Dokumen					1	10.000.000				10.000.000						
2.15.01.2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Data-data Kepegawaian															Bidang Sekretariat		
2.15.01.2.05.03					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data-Data Kepegawaian	Dokumen					1	20.000.000				20.000.000						
2.15.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah															Bidang Sekretariat		
2.15.01.2.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	Titik					5	20.000.000				20.000.000						
2.15.01.2.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)	Jenis					30	46.168.600	20	51.341.600		46.168.600						
2.15.01.2.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Stiker yang di cetak	Jenis					2.580	21.300.000	1000	10.000.000		21.300.000						
2.15.01.2.06.07					Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah BBM yang terpakai untuk patroli	Liter					3.333	29.997.000	10.000	30.000.000		29.997.000						
2.15.01.2.06.08					Fasilitas Kunjungan Tamu	Tercapainya Kordinasi antar Instansi	Bulan							12	30.000.000								
2.15.01.2.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi Antar Instansi	Bulan					12	200.766.000	12	150.000.000		200.766.000						
2.15.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															Bidang Sekretariat		
2.15.01.2.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	Lembar							100	1.000.000								
2.15.01.2.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Listrik yang Terbayarkan	Bulan							12	10.000.000								
2.15.01.2.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Pegawai Honore Yang Terbayarkan	Orang					35	1.365.600.000	35	1.365.600.000		1.365.600.000						
2.15.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															Bidang Sekretariat		
2.15.01.2.09.01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Yang Terbayarkan	Unit					6	52.800.000	6	25.000.000		52.800.000						
2.15.01.2.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Perlatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit					1	36.310.000	6	150.000.000		36.310.000						
02.15.02				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)																	
02.15.02.2.02					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota															Bidang Prasarana dan Keselamatan		
02.15.02.2.02.01					Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Panjang Jalan Yang Di bangun	KM/ M					2 dan 50	7.427.482.500				7.427.482.500						

02.15.02.2.03				Pengelolaan Terminal penumpang Tipe C		Tersedianya Pengelolaan Terminal penumpang Tipe C														Bidang lalu Lintas
02.15.02.2.03.03					Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal	M2					600	2.066.735.400							
02.15.02.2.05				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tersedianya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														Bidang lalu Lintas
02.15.02.2.05.05					Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Peserta Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Orang				100	60.000.000	100	30.000.000	60.000.000					
02.15.02.2.06				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/ Kota														Bidang Prasarana dan Keselamatan
02.15.02.2.06.01					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Rambu-Rambu lalu Lintas Yang Terpelihara	Buah				50	496.500.000			496.500.000					
02.15.02.2.06.02					Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas	Jenis					50	556.500.000							
02.15.04				Program Pengelolaan Penerbangan																
2.15.04.2.02					Penyediaan sarana dan Prasarana Serta pengelolaan Transportasi															Bidang Prasarana dan Keselamatan
2.15.04.2.02.05					Penyediaan sarana dan Prasarana Bandara/ Lapangan Udara	Jumlah Sarana dan Prasarana Bandara/ lapangan udara	M2				450	1.000.000.000			1.000.000.000					

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Tahun Ke :					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Program	
						1	2	3	4	5			
1	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	Menurunkan titik rawan kecelakaan transportasi	Menyediakan prasarana dan fasilitas keselamatan jalan sesuai dengan kebutuhan	Persentase penurunan titik rawan kecelakaan transportasi	Persen	80%	80%	80%	85%	90%	93%	93%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2	Meningkatnya kualitas layanan transportasi publik darat	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan publik sesuai dengan NSPK	Penataan jaringan trayek dan pemerataan wilayah cakupan	Persentase transportasi publik sesuai dengan NSPK	Persen	75%	75%	75%	80%	85%	90%	90%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		Menciptakan sistem hirarki simpul-simpul pelayanan angkutan umum berupa terminal, halte	Menyediakan prasarana/ simpul-simpul transportasi jalan sesuai dengan kebutuhan fungsi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi	Persen	60%	60%	60%	65%	70%	75%	75%	Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas pemahaman pengguna angkutan umum terhadap moda transportasi	Merencanakan, menyusun kebijakan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase Jumlah orang yang berpindah menggunakan transportasi publik	Persen	80%	80%	80%	85%	90%	92%	92%	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		Meningkatkan disiplin masyarakat pengguna moda transportasi	Pengawasan dan sosialisasi di bidang lalu lintas	Persentase Jumlah barang yang dipindahkan/diangkut menggunakan transportasi publik	Persen	85%	85%	85%	88%	90%	93%	93%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel	Penerapan standar Akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase anggaran yang menjadi temuan materil hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Perhubungan	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota
		Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Pelaporan tat kelola pemerintahan yang berkelanjutan yang mengacu pada prinsip-prinsip konsistensi, auditabel, obyektif, komprehensif, informatif, dan akurat	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan	Predikat	B	B	B	B	B	B	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota